

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 2000.
- Ateng Syfrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, TT.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001.
- Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Hambali, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015.
- Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Himsar Silaban, *Permasalahan dalam Administrasi Publik*, Semesta Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- _____, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, 1996.
- Junjun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebagai Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Koesoemaatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Mokhammad Najih dan Solimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Nicholas Henry, *Public Administration and Public Affairs* (diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh), Rajawali, Jakarta, 1995.
- Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1994.
- Prayudi Atmosudirdjo, *Ilmu Administrasi*, Untag University, Jakarta, 1970.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- Roni Haniitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1985.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1958.
- Rousseau, Jean Jacques, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeritas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986.
- Syafiie dan Inu Kencana, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara , Bandung, 1999.
- Turner, Mark and Hulme, *Governance, Administration and Development : Makiing the State Work*, MacMillan Press, London, 1997.
- Waldo, Dwight, ed, *Ideas and Issues in Public Administration*, Mc Graw-Hill Book Company Inc, New York, 1953.
- Yeremias. T. Keban. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*, Gaya Media, Yogyakarta, 2008.

B. Jurnal

Bhenyamin Hoessein, 2002, “*Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah,*” Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000.

Bhenyamin Hoessein, 2002, “Kebijakan Desentralisasi”, Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002.

C. Artikel

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Odd-Helge Fjeldstad, *Decentralization and Corruption, (A Review of the literature, Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003).*

Rondinely dalam Edward Mugabi, *Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies*, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; *Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004),p. 22.* Dikutip dari Rozan Anwar, *Pengembangan Model Administrasi Publik*, Fisip UI, 2009.

Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945, SI Media, Tangerang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran

Negara RI No. 125 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara RI No. 244 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Lembaran Negara RI No. 4741 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara RI No. 114 Tahun 2016.

Peraturan Daerah No 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 19 Seri D.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E

Peraturan Daerah No 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D.

Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D.

Peraturan Daerah No 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 22 Seri D.

Peraturan Daerah No 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D.

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil RI Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri D.

Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan SatPol PP, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E.

Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 16 Seri E.

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri D.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri D.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri D.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri D.

Peraturan Daerah No 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 17 Seri D.

E. Sumber Lainnya

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <http://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada Minggu 18 September 2016.